

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisikan mengenai tinjauan permukiman, kawasan permukiman kumuh, pola persebaran permukiman kumuh, ciri-ciri permukiman kumuh, dan faktor-faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh.

2.1 Kawasan Permukiman Kumuh

Permukiman Kumuh adalah area yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menunjang kehidupan serta merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan (Menpera, 2011). Sedangkan UN-Habitat, definisi kumuh memiliki indikator dari segi pelayanan dasar, yaitu akses terhadap air bersih, sanitasi, kualitas struktur rumah (atap, lantai, dan dinding) serta kepadatan luas lantai perkapita dimana rumah akan tergolong kumuh (tidak layak huni) ini juga menambahkan bahwa kawasan kumuh merupakan permukiman padat penduduk yang bercirikan pada kepemilikan rumah.

Undang – Undang No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman kumuh, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Sementara itu dalam Undang – Undang tersebut diberikan pengertian mengenai perumahan kumuh, yaitu perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Dengan demikian, kawasan kumuh mengindikasikan kawasan yang padat, tidak terawat, kotor, tidak teratur, dan berkekurangan.

Sedangkan Sandy (1982), permukiman ini dibedakan menjadi permukiman kelas tinggi dan kelas rendah. Permukiman kelas rendah ini sering disebut permukiman kumuh atau *slum*.

Permukiman berdasarakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4/1992 tentang perumahan dan permukiman. Permukiman adalah bagian dari

lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Permukiman yang menempati areal paling luas dalam pemanfaatan ruang kota mengalami perkembangan penduduk dan mempunyai pola-pola tertentu yang menciptakan bentuk dan struktur suatu kota yang berbeda dengan kota lain.

Menurut Undang-Undang No. 4/1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dan sarana lingkungan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

2.2 Pola Persebaran Permukiman Kumuh

Kota-kota tumbuh dan berkembang karena beberapa hal. Ada kota yang tumbuh karena perdagangan dan kemudian berkembang sebagai kota perdagangan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Tidak ada kota yang memiliki satu fungsi seperti kota pelajar, atau kota industri dan lainnya. Struktur kota di Indonesia baik kota kolonial, bekas Gemeente maupun kota-kota bukan bekas Gemeente akan nampak ada perbedaan, struktur kota bekas Gemeente memiliki : 1. Pusat usaha meliputi toko, pasar lokal; 2. Perumahan kumuh dan padat; 3. Perumahan baik; 4 Perumahan kumuh dengan lorong-lorong yang sempit. Sedangkan struktur kota bukan bekas Gemeente memiliki: 1. Pusat usaha meliputi toko; pasar los; 2. Permukiman baik, tidak ada lorong sempit. Persebaran permukiman membicarakan dimana terdapat permukiman kumuh dan di mana tidak terdapat permukiman kumuh dalam satu wilayah. Disamping itu juga membahas bagaimana terjadinya permukiman kumuh, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya persebaran permukiman kumuh. Dengan kata lain permukiman kumuh membicarakan tentang persebaran permukiman kumuh baik lokasi penyebaran, proses terjadinya, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya persebaran permukiman kumuh.

2.3. Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Permen PUPR No.2/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Untuk melakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh digunakan kriteria. Penentuan kriteria kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti, bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

1. Kriteria Kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung yang mencakup ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang. Ketidakteraturan bangunan merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang meliputi :
 - a) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona.
 - b) Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam RTBL, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, konsep orientasi lingkungan dan wajah jalan.
 - c) Tingkat kepadatan bangunan tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman kumuh dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR dan RTBL atau Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR dan RTBL.
2. Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan yang meliputi :
 - a) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman.
 - b) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

- c) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman merupakan kondisi sebagai lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.
 - d) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk yang merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan serjadi kerusakan permukaan jalan.
3. Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum yang mencakup :
- a) Ketidaktersedian akses aman air minum
 - b) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku
 - c) Ketidaktersediaan akses aman air minum merulakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memenuhi syarakat kesehatan.
 - d) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu yang merupakan kondisi dimana kebutuhan air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari.
4. Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan yang mencakup :
- a) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan.
 - b) Ketidaktersediaan drainase
 - c) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan
 - d) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya.
 - e) Kualitas kontruksi drainase lingkungan buruk.
 - f) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan yang merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali setahun.

- g) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk yang merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup telah terjadi kerusakan.
5. Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah yang mencakup :
- a) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku
 - b) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis
 - c) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri dari kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara individual/domestik, komunal maupun terpusat.
 - d) Tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat.
6. Kriteria ditinjau dari pengelolaan persampahan yang mencakup :
- a) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
 - b) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.
 - c) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
 - d) Kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai seperti , tempat sampah dengan pemilihan sampah pada skala domestik atau rumah tangga, tempat pengumpulan sampah (TPS) pada skala 3R (*reduce, reuse, recycle*) pada skala lingkungan, gerobak sampah dan atau truk sampah pada skala lingkungan, tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) pada skala lingkungan.

- e) Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis yang merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memenuhi persyaratan sebagai, pewadahan dan pemilihan domestik, pengumpulan lingkungan, pengangkutan lingkungan, dan pengolahan lingkungan.
7. Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran yang merupakan kondisi dimana tidak tersedianya :
- a) Pasokan air yang diperoleh dari sumber alam maupun buatan
 - b) Jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran
 - c) Sarana komunikasi untuk pembirithuan terjadinya kebakaran
 - d) Data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan yang mudah diakses.

Berikut adalah Kriteria Permukiman Kumuh dan Kriteria Khusus Permukiman Kumuh yang berdasarkan sebagai berikut :

1. Kriteria Umum Permukiman Kumuh

- a) Mandiri dan produktif dalam banyak aspek, namun terletak pada tempat yang perlu dibenahi.
- b) Keadaan fisik hunian minim dan perkembangannya lambat. Meskipun terbatas, namun masih dapat ditingkatkan.
- c) Para penghuni lingkungan permukiman kumuh pada umumnya bermata pencaharian tidak tetap dalam usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah.
- d) Pada umumnya penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut.
- e) Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sitem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen.

1. Kriteria Khusus Permukiman Kumuh

- a. Berada di lokasi tidak legal
- b. Dengan keadaan fisik yang substandar, penghasilan penghuninya amat rendah miskin.
- c. Tidak dapat dilayani berbagai fasilitas kota.
- d. Tidak diingini kehadirannya oleh umum, kecuali yang berkepentingan.
- e. Permukiman kumuh selalu menempati lahan dekat pasar kerja (non formal), ada sistem angkutan yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu murah.

1.4.Ciri-ciri Permukiman Kumuh

Ciri dari pemukiman kumuh adalah letak dan bentuk perumahan yang tidak teratur, sarana infra struktur kota sangat sedikit bahkan tidak ada sama sekali, tingkat pendidikan yang rendah, kepadatan bangunan dan penduduknya, pendapatan penduduk yang rendah, serta pada umumnya penduduknya bekerja disektor informal. Bangunan yang padat dan material bangunannya dalam keadan darurat tetapi karakteristik pemukiman kumuh sebenarnya terbagi-bagi dan tertentu. Menurut Anas (1995), ada tiga bentuk dasar pemukiman kumuh, yaitu :

- *Menetap dan permanen*, yaitu pemukiman kumuh yang terjadi secara organis akibat semakin padatnya penduduk pada suatu kawasan. Pemukiman ini berasal dari lingkungan yang teratur tetapi lambat laun menjadi kumuh akibat kurang kontrolnya penendalian pembangunan oleh penghuni pemukiman tersebut.
- *Transito*, yaitu bentuk pemukiman yang kumuh yang sifatnya sementara dan sebagian besar penghuninya menetap untuk sementara waktu.
- *Permukiman kumuh yang tumbuh* karena adanya spekulasi demi mendapatkan ganti rugi bila digusur. Kondisi ini berlangsung secara perlahan-lahan menempati lahan kosong yang ada pada tempat terlarang di pusat kota.

1.5.Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Permukiman Kumuh

Penyebab utama timbulnya lingkungan kumuh antara lain urbanisasi dan yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya mencicil atau menyewa rumah, kurang tegasnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, program perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah (misalnya tarif sewa rumah makin tinggi), dan disiplin warga yang rendah. Pemecahan masalah dilakukan antara lain melalui perbaikan kampung, peremajaan kota, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah sewa bertingkat, penataan lingkungan, penerapan pembudidayaan hidup bersih dan sehat, dan penyediaan tempat usaha (Komarudin, 1997).

Hariyanto (2008), mengatakan bahwa faktor penyebab munculnya kawasan kumuh (*slum* dan *Squatter*) dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung. Faktor-faktor yang bersifat langsung yang menyebabkan munculnya kawasan kumuh adalah faktor fisik yaitu yang dicirikan dengan kondisi perumahan dan sanitasi lingkungan. Faktor-faktor yang bersifat tidak langsung adalah faktor-faktor yang secara langsung tidak berhubungan dengan kekumuhan, tetapi faktor-faktor yang dinilai berdampak tidak langsung terhadap kekumuhan adalah faktor ekonomi masyarakat, sosial, dan budaya masyarakat.

Penyebab munculnya permukiman kumuh adalah sebagai berikut (Sadyohutomo, 2008):

- Pertumbuhan kota yang tinggi, yang tidak diimbangi oleh tingkat pendapatan yang cukup.
- Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah perkembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah bidang tanah dan membangun permukiman tanpa didasari perencanaan tapak (*site plan*) yang memadai. Akibatnya bentuk dan tata letak kaveling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi prasarana dasar permukiman.

Sedangkan Menurut Rindrojono (2013), Adapun faktor – faktor yang menyebabkan tumbuhnya di permukiman kumuh di daerah perkotaan, yakni :

1. Faktor Urbanisasi

Urbanisasi adalah substansi pergeseran atau transformasi perubahan corak sosio–ekonomi masyarakat perkotaan yang berbasis industri dan jasa – jasa. Proses Urbanisasi ini merupakan suatu gejala umum yang di alami oleh negara – negara yang sedang berkembang dan proses urbanisasi ini berlansung pesat di karenakan daya tarik daerah perkotaan yang sangat kuat, baik yang bersifat aspek ekonomi maupun yang bersifat non ekonomi. Selain itu, daerah pedesaan yang serba kekurangan merupakan pendorong yang kuat dalam meningkatkan arus urbanisasi ke kota – kota besar.

Kota yang mulai padat penduduk dengan penambahan penduduk tiap tahunnya melampaui penyediaan lapangan pekerjaan yang ada di daerah perkotaan sehingga menambah masalah baru bagi kota. Tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi bagi para penduduk yang urbanisasi dari desa, memaksa para urbanisasi ini untuk tinggal di daerah pinggiran sehingga akan terjadinya lingkungan yang kumuh dan menyebabkan banyaknya permukiman liar di daerah pinggiran ini.

2. Faktor Lahan Perkotaan

Lahan di daerah perkotaan semakin hari luas lahannya berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang melonjak drastis dari tahun ke tahun, ini merupakan permasalahan yang di hadapi di daerah perkotaan sehingga masalah perumahan di daerah perkotaan merupakan masalah serius yang dihadapi daerah perkotaan. Permasalahan perumahan sering disebabkan karena ketidakseimbangan antara penyediaan unit rumah bagi orang yang berekonomi lemah dan kaum yang tergolong ekonomi mampu di daerah perkotaan. Sehingga banyak masyarakat yang berekonomi lemah hanya mampu tinggal di unit – unit hunian di permukiman yang tidak layak.

3. Faktor Prasarana dan Sarana

Kondisi sarana dan prasarana dasar di permukiman seperti air bersih, jalan, drainase, jaringan sanitasi, listrik, sekolah, pusat pelayanan, ruang terbuka hijau, dan pasar tidak memenuhi standar dan tidak memadai sehingga menyebabkan permukiman tersebut bisa menjadi kumuh.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi

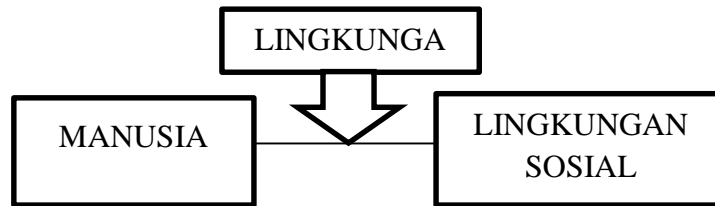
Pada umumnya sebagian besar penghuni lingkungan permukiman kumuh mempunyai tingkat pendapatan yang rendah karena terbatasnya akses terhadap lapangan kerja yang ada. Tingkat pendapatan yang rendah ini yang menyebabkan tingkat daya beli yang rendah pula atau terbatasnya kemampuan untuk mengakses pelayanan sarana dan prasarana dasar. Selain itu, ketidakmampuan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah yang layak huni menambah permasalahan permukiman di daerah perkotaan.

5. Faktor Tata Ruang

Dalam tata ruang, permukiman kumuh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk struktur ruang kota. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kota harus didasarkan pada pemahaman bahwa pengembangan kota harus dilakukan sesuai dengan daya dukungnya termasuk daya dukung yang relatif rendah di lingkungan permukiman kumuh. Jika salah pemahaman dan pemanfaatan ruang kota akan menimbulkan dampak yang merusak lingkungan serta berpotensi mendorong tumbuh kembangnya lingkungan permukiman kumuh atau tumbuhnya permukiman kumuh baru di daerah perkotaan, bahkan jadi akan menghapus lingkungan permukiman lama atau kampung – kampung kota yang mempunyai nilai warisan budaya tinggi.

2.6. Dampak Adanya Permukiman Kumuh

Terciptanya sebuah kawasan kumuh tentu akan berdampak pada aspek, baik secara lokal maupun nasional. Secara umum, dampak yang ditimbulkan dari adanya kawasan kumuh berpengaruh terhadap aspek lingkungan, manusia dan sosial ekonomi. Masing – masing aspek tersebut akan memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dan tidak dijalankan secara tersendiri, tercantum dalam dokumen pembangunan perkotaan.



Gambar 2.1

Dampak Adanya Permukiman Kumuh

Dari aspek lingkungan, kawasan kumuh akan berdampak sebagai faktor penurunan kualitas lingkungan, misalnya kawasan ini menjadi kawasan rawan bencana terutama banjir dan kebakaran. Dikarenakan adanya kepadatan bangunan yang terbilang tinggi, lokalisasi pengumpulan barang – barang bekas, dan ketiadaan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai area peresapan air hujan. Penurunan kualitas lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap aspek kesehatan masyarakat terutama terena penyakit berbasis lingkungan. Masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh umumnya lebih memikirkan pergerakan ekonomi keluarganya dibandingkan aspek kesehatan lingkungan, walaupun tetap akan terlihatnya fenomena kesenjangan sosial ekonomi. Dampak kawasan kumuh dari ketiga aspek diatas akan sangat erat hubungannya dengan pembangunan perkotaan yang diharapkan di masa mendatang. Karena kota sebagai pusat kegiatan akan memberi kesan pencipta dan perputaran roda kehidupan bagi sebagian besar penduduk.

2.7. Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kondisi Permukiman Kumuh

Budiharjo (2011), menyatakan bahwa kondisi permukiman kumuh diperkotaan, banyak dipengaruhi oleh karakteristik fisik dan sosial yang ada pada masyarakat. Karakteristik fisik dan sosial yang diperkirakan berpengaruh terhadap permukiman kumuh perkotaan ini adalah : tingkat pendapatan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan penilaian masyarakat terhadap lingkungan permukimannya. Pengaruh faktor- faktor tersebut terhadap kondisi permukiman kumuh akan dikemukakan berikut ini :

- Faktor Pendapatan
- Faktor Tingkat Pendidikan
- Faktor Mata Pencaharian
- Faktor Anggota Keluarga
- Faktor Status Kepemilikan Lahan dan Bangunan

Didalam suatu permukiman atau rumah sehat suatu keluarga memerlukan suatu pekerjaan yang dapat menunjang aktifitas kehidupan sehari-hari. Pekerjaan dalam arti luas adalah aktifitas utama yang dilakukan oleh manusia. Pekerjaan yang dijalani seseorang dalam kurun waktu yang lama disebut sebagai karir, berikut ini adalah jenis-jenis pekerjaan menurut data Badan Pusat Statistik (2018):

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. PNS/TNI/Polri | f. Karyawan/Pekerjaan |
| b. Buruh (tani/industri) | g. Ibu Rumah Tangga |
| c. Wiraswasta | h. Tidak Bekerja |
| d. Nelayan | i. Jasa |
| e. Pedagang | |

2.8. Bantaran dan Sempadan Sungai

PP No 38 Tahun 2011 tentang sungai adalah ruang antara tepi sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri atau kanan sungai. Sedangkan tanah bantaran adalah tanah yang timbul secara alami yang disebabkan oleh endapan lumpur atau pasir yang dibawa oleh air, yang berlangsung secara terus-menerus dan biasanya dipercepat oleh bantuan tangan manusia dan lingkungan.

Menurut PP No 38 Tahun 2011 (tentang sungai) garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Berikut adalah peraturan perundangan-undangan yang dijadikan pedoman perencanaan garis sempadan antara lain :

1. PP No 47/1997 menetapkan bahwa lebar sempadan sungai bertanggung di luar daerah permukiman adalah lebih dari 5 meter sempadan kaki tanggul. Sedangkan lebar sempadan sungai yang tidak bertanggung di daerah permukiman,

ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis dan sosial ekonomis oleh pejabat berwenang.

2. PP No 38 Tahun 2011 (tentang sungai, tentang garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan) sebagai berikut :

- ❖ Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter.
- ❖ Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, dan
- ❖ Paling sedikit berjarak (tiga puluh meter) dari tepi kiri dan kanan sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

2.2.5 Tingkat Permukiman Kumuh

1.6. Kriteria dan Indikator Kawasan Kumuh

Adapun kriteria permukiman kumuh yang dapat di definisikan sebagai berikut:

- Lingkungan yang berpenghuni padat (melebihi 500 orang per Ha)
- Hunian dibangun di atas tanah milik negara atau orang lain dan di luar perundang-undangan yang berlaku.
- Sarana prasarana tidak ada atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan.
- Jumlah dari rumah yang sangat padat dan ukurannya di bawa standar.
- Kondisi sosial ekonomi masyarakat paling rendah.

Indikator permukiman kumuh yang akan dipergunakan untuk menentukan penanganan permukiman kumuh berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02 Tahun 2016 Tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Maka akan di jelaskan bahwa kriteri kekumuhan dapat di lihat dari beberapa indikator yang dapat dilihat pada bagian yang di bawa :

1. Jenis Bangunan

Adapun definisi jenis bangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah dari sisi jenis bangunan yang masih semi permanen maupun semi permanen, luasan bangunan yang berukuran kecil dan sempit, tidak adanya pemisahan bagian untuk ruang privat maupun ruang bersama, kurangnya perawatan dari pemilik hunian terhadap bangunan huniaannya dan tidak adanya sertifikat kepemilikan yang sah oleh masyarakat terhadap hunian yang ditinggalinya selama ini. (Amir, Nurmaida 2013).

2. Kondisi Jalan Lingkungan

Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan yang akan dijelaskan dalam Undang – Undang tersebut adalah dengan jalan lingkungan meliputi jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 dijelaskan pengertian mengenai Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disebut J Ling-P adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut J Ling-S adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

3. Pengelolaan Persampahan

Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

Para ahli kesehatan masyarakat Amerika membuat batasan, sampah (waste) adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak

disenangi, atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia, dan tidak terjadi dengan sendirinya. Dari batasan ini jelas bahwa sampah adalah hasil kegiatan manusia yang dibuang karena sudah tidak berguna. Dengan demikian sampah mengandung prinsip sebagai berikut :

- Adanya sesuatu benda atau bahan padat
- Adanya hubungan langsung/tidak langsung dengan kegiatan manusia
- Benda atau bahan tersebut tidak dipakai lagi (Notoatmojo, 2003).

4. Pengelolaan Air Limbah

Undang – Undang Republik Indonesia No 1. Tahun 2011 Air limbah merupakan salah satu masalah dalam pengendalian dampak lingkungan industri karena karakteristik fisik dan karakteristik kimia air limbah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Air limbah yang dihasilkan terdiri dari zat-zat organik dan zat-zat non organik yang tidak berbahaya. Akan tetapi, air limbah tersebut mempunyai harga zat padat terlarut, zat padat yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan sebelum dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali sebagai air pendukung aktivitas industri.

Air limbah adalah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan lazimnya muncul karena hasil aktivitas manusia (Risdianto 2007).

5. Pelayanan Air Bersih

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/menkes/sk/XI/2002, terdapat pengertian mengenai Air Bersih yaitu air yang di pergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak. Bagi manusia

kebutuhan akan air sangat mutlak karena sebenarnya zat pembentuk tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 73% dari bagian tubuh. Air didalam tubuh manusia berfungsi sebagai pengangkut dan pelarut bahan-bahan makanan yang penting bagi tubuh. Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia berupaya mendapatkan air yang cukup baik untuk di konsumsi. Dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari manusia sangat tergantung pada air, karena air dipergunakan pula untuk mencuci, membersihkan peralatan, mandi dan lain sebagainya. Air merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan vital bagi mahluk hidup diantaranya sebagai air minum atau keperluan rumah tangga lainnya. Air yang digunakan harus bebas dari kuman penyakit dan tidak mengandung bahan beracun. Ditinjau dari segi kualitas (Mutu) air secara langsung atau tidak langsung pencemaran akan berpengaruh terhadap kualitas air.

Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh manusia sebagai air minum berpedoman pada standar kualitas air terutama dalam penilaian terhadap produk air minum yang dihasilkannya, maupun dalam merencanakan system dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya air (Razif, 2001).

6. Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung merupakan sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan

gedung dan lingkungan disebutkan bahwa pengelolaan proteksi kebakaran adalah upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun meminimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif. Berikut adalah tabel 2.1 tentang kriteria parameter kekumuhan.

7. Sistem Drainase

Drainase merupakan saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia. Dalam bahasa Indonesia, drainase bisa merujuk pada parit di permukaan tanah atau gorong-gorong di bawah tanah. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir. Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam kaitannya dengan sanitasi. (Dr. Ir. Suripin, M.Eng.2004).

Sedangkan pengertian tentang drainase kota pada dasarnya telah diatur dalam SK menteri PU No. 233 tahun 1987. Menurut SK tersebut, yang dimaksud drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai melintas di dalam kota.

2.5.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yang diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya berdasarkan fakta – fakta yang tampak.

Nazir (1988) menyatakan bahwa metode deskriptif merupakan metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan analisis deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat serta hubungan antarfenome yang diselidiki.

Sugiyono (2005) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Whitney (1960) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

2.5.2 Analisis Deskriptif Kualitatif

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Cresswell, 1998). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Sutopo (2006), menyatakan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi interview dan observasi berpartisipatif, sedangkan metode noninteraktif meliputi observasi takberpartisipatif, tehnik kuesioner, mencatat dokumen, dan partisipasi tidak berperan.

2.5.3. Tinjauan Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dalam penulisan laporan ini akan menggunakan beberapa jurnal terdahulu atau skripsi yang terkait dengan laporan ini sebagai acuan agar penulis bisa menyelesaikan laporan ini. Untuk itu penulis akan melihat beberapa contoh penelitian terdahulu seperti, variabel apa saja yang digunakan oleh penelitian tersebut, caranya seperti apa, hasil penelitiannya dan metode apa saja yang digunakan. Penelitian yang telah dilakukan oleh :

Muhammad Rijal Syukri, Sri Sutarni Arifin (2018) dengan judul penelitian Identifikasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan variabel yang digunakan adalah; kondisi jalan lingkungan ,kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, kondisi persampahan. Cara dari penelitian ini adalah tahap persiapan, observasi lapangan, pengambilan data, baik sekunder maupun primer, setelah itu dilakukan analisis terhadap kekumuhan. Sehingga hasil yang ditemukan oleh penelitian seperti ; kepadatan bangunan tinggi dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, kondisi jalan lingkungan yang belum diperkeras dan rusak, permasalahan akses terhadap air minum dengan kualitas baik, permasalahan drainase air yang belum tersedia dan belum memenuhi persyaratan teknis, belum tersedianya sarana pengelolaan air limbah yang sesuai persyaratan teknis, belum tersedianya fasilitas sanitasi masyarakat (MCK) yang sesuai persyaratan teknis, belum tersedianya sarana pengelolaan persampahan yang sesuai persyaratan teknis.

Hafsah Fatihyl Ily dan Yanto Budisusanto (2017) dengan judul penelitian Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP (analytical hierarchy process) Kota Surabaya. Variabel yang digunakan adalah, bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran. Untuk cara penelitian dengan menggunakan data primer, observasi lapangan. Begitu juga dengan data sekunder seperti kondisi demografi, peta gampong, peta kondisi eksisting

sarana dan prasarana infrastruktur gampong. Hasil yang ditemukan dari aspek fisik : Kondisi bangunan gedung yang tidak layak, tata letak bangunan tidak teratur, tidak memiliki sempadan bangunan jalan, kondisi antara rumah tidak memiliki space yang layak/berdempetan, jalan dan sistem drainase yang buruk.

Niken Fitria dan Setiawan (2014) dengan judul penelitian Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Indikator yang digunakan adalah kondisi air bersih, MCK, pengelolaan sampah, air limbah, drainase, dan jalan. Cara yang digunakan oleh penelitian tersebut seperti ; diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan survey dengan menggunakan instrumen kuesioner terhadap beberapa responden di kawasan tersebut. Untuk hasil yang diperoleh yaitu, penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan berbasis kearifan lokal, pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan penyiapan lokasi kegiatan usaha-usaha ekonomi produktif melalui pola kemitraan, peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap fungsi-fungsi ruang dan produktif ruang perkotaan, pengambilan keputusan strategi (pemerintah dan masyarakat), dan penguatan kapasitas individu dan kelompok-kelompok swadaya masyarakat.

Haryati (2014) dengan judul penelitian Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo. Diketahui penelitian tersebut menggunakan variabel yaitu, air bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, dan drainase. Dengan cara digunakan melalui pembobotan berdasarkan hasil kuesioner dan observasi. Metode yang digunakan, teknik analisis kuantitatif, teknik analisis deskriptif, teknik analisis visual. Hasil yang diperoleh oleh penelitian tersebut yaitu, sering terjadinya banjir bila musim hujan dan kualitas lingkungan yang rendah akibat dari buruknya kondisi bangunan dan jarak bangunan yang sangat rapat, kondisi prasarana lingkungan seperti kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, kondisi persampahan yang buruk.

Elpidia dan Budisusanto (2017) dengan judul Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan RT di Kelurahan Keputihan Kota Surabaya. Penelitian tersebut menggunakan beberapa variabel yaitu; kondisi bangunan gedung,

kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengolahan air limbah, kondisi pengolahan persampahan, kondisi proteksi kebakaran dengan cara yaitu berupa survey lapangan, observasi, kuesioner dan juga hasil analisis melalui aplikasi ArcGis 10.2. Sehingga hasil yang ditemukan adalah; ketidakteraturan bangunan, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis, cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, ketidaktersediaan drainase, ketidakterhubungan dengan sistem drainase, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis, tidak terpeliharanya sarana dan prasarana, ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran.

Istikasari dan Khadiyanto (2014) dengan judul penelitian Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi dengan variabel yang digunakan adalah; ari bersih, sanitasi, sistem pengelolaan sampah, saluran drainase dengan cara observasi lapangan, pengambilan data, baik sekunder maupun primer, setelah itu dilakukan analisis. Sehingga hasil yang ditemukan adalah pengelolaan air bersih belum memadai, adapun yang masih menggunakan sumur, sanitasi tidak digunakan dengan baik, sistem pengelolaan sampa juga belum baik, saluran drainase tidak berjalan dengan lancar dikarenakan masyarakat yang buang sampah sembarangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Judul Artikel, Penulis, Judul Jurnal/ Skripsi | Variabel | Metode | Lokasi | Cara | Hasil |
|----|--|---|----------------------------------|--------------------|--|--|
| 1 | <p>Judul : Identifikasi permukiman kumuh di kelurahan talumolo Kecamatan Dumbon Raya Kota Gorontalo</p> <p>Penulis : Muhammad Rijal Syukri, Sri Sutarni Arifin</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi jalan lingkungan 2. Kondisi drainase 3. Kondisi air minum 4. Kondisi air limbah 5. Kondisi persampahan | Deskriptif Kuantitatif | Kelurahan talumolo | Tahap persiapan, observasi lapangan, pengambilan data, baik sekunder maupun primer | <p>Kepadatan bangunan tinggi dan kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat, kondisi jalan lingkungan yang belum diperkeras dan rusak, permasalahan akses terhadap air minum dengan kualitas baik, permasalahan drainase air yang belum tersedia dan belum memenuhi persyaratan teknis, belum tersedianya sarana pengelolaan air limbah yang sesuai persyaratan teknis, belum tersedianya fasilitas sanitasi masyarakat (MCK) yang sesuai persyaratan teknis, belum tersedianya sarana pengelolaan persampahan yang sesuai persyaratan teknis.</p> |
| 2 | <p>Judul : Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan gedung 2. Kondisi jalan lingkungan 3. Penyediaan air minum | Metode AHP (analytical hierarcy) | Kota Surabaya | Cara penelitian dengan menggunakan data primer, observasi lapangan. Begitu | <p>Kondisi bangunan gedung yang tidak layak, tata letak bangunan tidak teratur, tidak memiliki sempadan bangunan jalan, kondisi</p> |

| No | Judul Artikel, Penulis, Judul Jurnal/ Skripsi | Variabel | Metode | Lokasi | Cara | Hasil |
|----|--|---|---|-----------------|--|--|
| | Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Menggunakan Metode AHP (analytical hierarcy process) Kota Surabaya Penulis : Hafsah Fatihyl Ilmy dan Yanto Budisusanto | 4. Drainase lingkungan 5. Pengelolaan limbah 6. Pengelolaan persampahan 7. Proteksi kebakaran | process) | | juga dengan data sekunder seperti kondisi demografi, peta gampong, peta kondisi eksisting sarana dan prasarana infrastruktur gampong | antara rumah tidak memiliki space yang layak/berdempetan, jalan dan sistem drainase yang buruk |
| 3 | Judul : Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat Penulis : Niken Fitria dan Setiawan | 1. Kondisi air bersih 2. MCK 3. Pengelolaan sampah 4. Air limbah 5. Drainase 6. Jalan lingkungan | Metode deskriptif | Kelurahan Kapuk | Diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan survey dengan menggunakan instrumen kuesioner | Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan berbasis kearifan lokal, Pengembangan potensi ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha dan penyiapan lokasi kegiatan usaha-usaha ekonomi produktif melalui pola kemitraan. |
| 4 | Judul : Identifikasi dan Penanganan Kawasan Kumuh Kota Gorontalo | 1. Air bersih 2. Sanitasi 3. Sistem pengelolaan sampah 4. Drainase | analisis kuantitatif, teknik analisis deskriptif, | Kota Gorontalo | Melalui pembobotan berdasarkan hasil kuesioner dan observasi | Seriing terjadinya banjir bila musim hujan dan kualitas lingkungan yang rendah akibat dari buruknya kondisi bangunan dan jarak bangunan yang sangat rapat, kondisi prasarana lingkungan seperti kondisi jalan |

| No | Judul Artikel, Penulis, Judul Jurnal/ Skripsi | Variabel | Metode | Lokasi | Cara | Hasil |
|----|--|--|------------------------|---------------------|---|--|
| | Penulis : Haryati | | teknik analisis visual | | | lingkungan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, kondisi persampahan yang buruk. |
| 5 | Judul : Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan RT di Kelurahan Keputihan Kota Surabaya Penulis : Elpidia dan Budisusanto | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bangunan gedung 2. Kondisi jalan lingkungan 3. Kondisi penyediaan air minum 4. Kondisi drainase lingkungan 5. Kondisi Pengolahan air limbah 6. Kondisi pengolahan Persampahan 7. Kondisi proteksi kebakaran | | Kelurahan Keputihan | Survey lapangan, observasi, kuesioner dan juga hasil analisis melalui aplikasi ArcGis 10.2 | Ketidakteraturan bangunan, ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis, cakupan pelayanan jalan lingkungan, kualitas permukaan jalan lingkungan, tidak terpenuhinya kebutuhan air minum, ketidakterhubungan dengan sistem drainase, prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis. |
| 6 | Judul : Identifikasi Permukiman Kumuh di Pusat Kota Jambi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih 2. Sanitasi 3. Sistem pengelolaan sampah, 4. Saluran drainase | Kuantitatif | Pusat Kota Jambi | Observasi lapangan, pengambilan data, baik sekunder maupun primer, setelah itu dilakukan analisis | Pengelolaan air bersih belum memadai, adapun yang masih menggunakan sumur, sanitasi tidak digunakan dengan baik, sistem pengelolaan sampah juga belum baik, saluran drainase tidak berjalan dengan lancar |

| No | Judul Artikel, Penulis, Judul Jurnal/ Skripsi | Variabel | Metode | Lokasi | Cara | Hasil |
|----|--|--|----------------------------|--|---|--|
| | Penulis : Istikasari dan Khadiyanto | | | | | dikarenakan masyarakat yang buang sampah sembarangan |
| 7 | Judul : Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Kota Penulis : Raisya Nursyahbani ¹ dan Bitta Pigawati ² | | kuantitatif deskriptif | Kampung Kota | Data yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan survey dengan menggunakan instrumen kuesioner terhadap beberapa responden di kawasan tersebut | Sebagian besar hunian di Kampung Gandekan didominasi oleh bangunan yang masih kurang layak huni karena belum memiliki persyaratan sesuai standar kesehatan hunian. |
| 8 | Judul : Identifikasi Tingkat Kekumuhan Kawasan Bantaran Sungai Ampera Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan Penulis : Jekson Koterisa ¹ , Windy Mononimbar ² , & Verry Lahamendu ³ | 1. Bangunan gedung 2. Jalan Lingkungan 3. Penyediaan Air Minum 4. Drainase Lingkungan 5. Pengelolaan Air Limbah 6. Pengelolaan Persampahan 7. Proteksi Kebakaran 8. RTH | kualitatif dan kuantitatif | Kelurahan Kaibus, Kabuapten Sorong Selatan | Kualitatif deskriptif dan didukung dengan metode kuantitatif melalui pembobotan atau scoring berdasarkan variabel dan indikator permukiman kumuh berdasarkan Panduan Penyusunan RP2KPKP | Berdasarkan hasil analisis bahwa mayoritas bangunan hunian pada lokasi permukiman berkontruksi semi permanen yang menunjukkan bahwa masyarakat di bantaran sungai Ampera Kelurahan Kaibus memiliki tempat tinggal yang kualitasnya cukup baik, tetapi masih ada juga mereka yang menepati rumah tidak permanen karena mungkin memiliki pendapatan yang rendah. |

| No | Judul Artikel, Penulis, Judul Jurnal/ Skripsi | Variabel | Metode | Lokasi | Cara | Hasil |
|----|---|---|---|--------------------------------|---|---|
| 9 | Judul : Identifikasi Karakteristik dan Pemetaan Tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh Gampong Panggong Kecamatan Johan Pahlawan Penulis : Cut Suciatina Silvia1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi bangunan hunian 2. Kondisi jalan lingkungan 3. Kondisi penyediaan air minum 4. Kondisi drainase lingkungan 5. Kondisi pengelolaan air limbah 6. Kondisi pengelolaan sampah 7. Kondisi pengamanan kebakaran | kuantitatif dan kualitatif | Kecamatan Johan Pahlawan | Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari Gampong Panggong berupa data kondisi demografi, peta gampong | Berdasarkan hasil analisis kondisi bangunan hunian didapatkan kondisi bangunan hunian yang memiliki ketidakraturan bangunan paling dominan berada di dusun Bayam, Kangkung dan dusun Tomat yang memiliki rerata kondisi ketidakraturan bangunan hunian sebesar 98%. Tingkat kepadatan bangunan hunian rerata sebesar 48 unit/ha, dimana tingkat kepadatan bangunan hunian masih rendah dibawah 250 unit/ha. Untuk kelayakan bangunan yang dilihat berdasarkan kondisi bangunan hunian yang memiliki luas lantai $\leq 7,2m^2/jiwa$ dan kondisi Aladin yang tidak sesuai persyaratan teknis paling besar berada di dusun Selada sebesar 51% dan 60%. |
| 10 | Judul : Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh Tepian Sungai Kecamatan Kolaaka, Sulawesi Tenggara Penulis : Nurmaida Amri | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kualitas 2. Kelayakan Bangunan 3. Tingkat Kepadatan Bangunan 4. Tingkat Penggunaan Luas Lantai 5. Tingkat Pelayanan Air Bersih 6. Kondisi Sanitasi Lingkungan 7. Kondisi Persampahan | deskriptif, eksploratif dan interpretatif | Tepian sungai Kecamatan Kolaka | Dengan melakukan observasi dan eksplorasi data primer dengan mengamati kondisi lingkungan perumahan & permukiman kumuh di kawasan tepian sungai, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. | Hasil penelitian menunjukkan secara umum karakteristik perumahan dan permukiman tepian air di Kelurahan Lamokato: (1) kondisi sarana, prasarana & utilitas buruk; (2) tingkat kepadatan Bangunan tinggi; (3) kelayakan bangunan rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi penduduk yang umumnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga motivasi untuk memiliki lingkungan dan rumah yang layak sangat rendah |

| No | Judul Artikel, Penulis, Judul Jurnal/ Skripsi | Variabel | Metode | Lokasi | Cara | Hasil |
|-----|--|---|--|---------------------|--|--|
| 11. | Penulis : Angkotasari, S., & Warlina, L. (2014). Judul : Identifikasi Tingkat Ketahuan Masyarakat Tentang Upaya – Upaya Perbaikan Lingkungan Sungai Cikapundung Kota Bandung. <i>Majalah Ilmiah UNIKOM</i> , 12(1). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Penghuni Rumah 2. Pendidikan Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga 3. Status Kepemilikan Lahan dan Rumah 4. Jumlah Rumah yang Paling Banyak | Data Primer dan Sekunder, Kuesioner dan Wawancara ke Setiap Rumah. | Kelurahan Tamansari | Pengumpulan data primer melalui kuesioner dan wawancara. Jenis data sekunder diperoleh melalui literatur atau studi pustaka. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketahuan masyarakat yang paling rendah terdapat pada ketahuan mengenai bantuan 1000 bibit pohon dan yang paling tinggi terdapat pada ketahuan mengenai pelaksanaan festival kukuyaan. |

2.6 Kriteria Permukiman Kumuh

Mengenai skor maka akan dilakukan pada kriteria-kriteria berdasarkan skala penilaian yang mempengaruhi permukiman kumuh dari setiap parameter. Kemudian dengan menggunakan metode skoring dilakukan analisis hingga menghasilkan klasifikasi tingkat permukiman kumuh di setiap kawasan. Permukiman kumuh akan memberikan kategori permukiman tersebut, dimana terdiri dari permukiman kumuh berada di atas air, tepi air, dataran rendah, perbukitan atau daerah rawan bencana. Berikut adalah kriteria-kriteria pada setiap parameter kekumuhan yang dapat dilihat pada tabel 2.2 yaitu.

Tabel 2.2

Indikator Kawasan Permukiman Kumuh

| No. | Indikator | Kriteria |
|-----|-------------------------|--|
| 1. | Jenis Bangunan | a. Ketidakteraturan bangunan b. Tingkat kepadatan bangunan c. Ketidak sesuai dengan persyaratan teknis bangunan |
| 2. | Jalan Lingkungan | a. Cakupan pelayanan jalan lingkungan b. Kualitas permukaan jalan lingkungan |
| 3. | Pengelolaan Persampahan | a. Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan |
| 4. | Pengelolaan Air Limbah | a. Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis |
| 5. | Pelayanan Air Minum | a. Ketersediaan akses aman air minum b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum |
| 6. | Proteksi Kebakaran | a. Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran b. Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran |
| 7. | Sistem Drainase | a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air b. Ketidaktersediaan drainase c. Ketidakterhubungan dengan sistem drainase perkotaan d. Kualitas konstruksi drainase |

Sumber : Analisis Bersarakan Peraturan Menteri dan Perumahan Rakyat Tahun 2014

Tabel 2.3

Klasifikasi Permukiman Kumuh

| JUMLAH NILAI | TINGKAT KEKUMUHAN |
|-------------------------|--------------------------|
| 71 -95 | Kumuh Berat |
| 45 – 70 | Kumuh Sedang |
| 19 – 44 | Kumuh Ringan |
| < 19 | Tidak Kumuh |

Sumber : Kementrian PUPR

Dalam penelitian ini akan dilakukan identifikasi kawasan permukiman kumuh dan juga di lakukan analisis terhadap parameter-parameter yang penyebab permukiman kumuh, berdasarkan tingkat kualitas permukiman di kawasan permukiman Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau. Identifikasi permukiman kumuh di lakukan berdasarkan pengertian permukiman kumuh, beserta pelayanan minimal yang di persyaratkan secara nasional, dalam menentukan kawasan permukiman kumuh di lakukan dengan menentukan prioritas kriteria-kriteria yang akan berpengaruh terhadap permukiman kumuh yang biasanya di gunakan tuju parameter permukiman kumuh dari Direktorat Permukiman Kumuh.

Klasifikasi kekumuhan yaitu kekumuhan tingkat berat, kekumuhan sedang, kekumuhan ringan, tidak kumuh. Dengan penelitian ini akan di lakukan identifikasi permukiman kumuh dengan skoring yang mampu menunjukkan kualitas permukiman dengan menghasilkan 4 klasifikasi dengan tingkat kekumuhan : kumuh berat, kumuh sedang, kumuh ringan, tidak kumuh beserta aspek-aspek penyebab kekumuhan berdasarkan tingkat kualitas permukiman. Yang di lihat dari tingkat kualitas setiap parameter kekumuhan di setiap lokasi, semakin besar hasil yang didapatkan maka semakin buruk kualitas yang ada, begitu juga sebaliknya semakin kecil skor yang didapatkan maka kualitas semakin baik. Dari perhitungan skor tersebut juga dapat di ketahui permasalahan yang akan menyebabkan kekumuhan dari setiap lokasi. Maka dengan tabel yang diatas kita bisa mengetahui tingkat klasifikasi kawasan permukiman kumuh didapatkan untuk setiap kelas.